

# ANALISIS POPULARITAS SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Akbar Karim<sup>1</sup>, Adang Suhendra<sup>2</sup>, Aviananta Tarigan<sup>3</sup>, Yusuf Yahya<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Perangkat Lunak Sistem Informasi, Magister Manajemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma

<sup>2,3,4</sup> Universitas Gunadarma, Jl. Margonda Raya No. 100 Depok

<sup>1</sup>[akubaru.karimu@gmail.com](mailto:akubaru.karimu@gmail.com), <sup>2</sup>[adang@staff.gunadarma.ac.id](mailto:adang@staff.gunadarma.ac.id), <sup>3</sup>[aviananta@staff.gunadarma.ac.id](mailto:aviananta@staff.gunadarma.ac.id),

<sup>4</sup>[yusuf@staff.gunadarma.ac.id](mailto:yusuf@staff.gunadarma.ac.id)

## Abstrak

Dengan penerapan teknologi informasi khususnya internet, membuat proses penyebaran informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah serta tanpa batasan jarak dan waktu. Internet diterapkan kedalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pemerintahan. Wujud nyata dari pengaplikasian *e-Government* di Indonesia adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. *E-Government* intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Saat ini terdapat 316 situs web pemerintah daerah yang dapat diakses. Mayoritas situs web pemerintah daerah baru memperhatikan segi kualitas, sedangkan segi efektivitas untuk meningkatkan popularitas situs web belum dilakukan, padahal sebagus apapun kualitas situs web jika tidak memperhatikan segi popularitas, maka kualitas yang bagus tersebut kurang optimal. Salah satu cara dalam mengukur popularitas situs web pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan perangkat yang dapat memperingkat popularitas situs web pemerintah daerah, dengan menggunakan parameter evaluasi Efektifitas (Popularitas *Link* dan Peringkat *Traffic*), Kecepatan (Waktu *Loading*), sil Situs Web dan Kesiapan Menuju *e-Government* terhadap masing-masing pemerintah daerah. Parameter evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini sudah dapat memeringkat popularitas situs web pemerintah daerah.

**Kata kunci :** *popularitas, situs web, pemerintah daerah, e-government.*

## 1. Pendahuluan

Penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting saat ini, hal ini dapat dilihat dari penerapan teknologi informasi khususnya internet yang tidak terbatas dalam bidang perdagangan saja (*e-Business* atau *e-Commerce*), melainkan juga dalam berbagai bidang lainnya seperti bidang pendidikan (*e-Learning*), bidang sosial (*social networking*), bidang perbankan (*e-Banking*) dan lain sebagainya. Berbagai keuntungan diberikan teknologi informasi khususnya internet, yaitu membuat proses penyebaran informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah serta tanpa batasan jarak dan waktu. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan teknologi ini membuat teknologi informasi khususnya internet banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk kedalam bidang pemerintahan.

Wujud nyata dari pengaplikasian *e-Government* yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya di Indonesia adalah

pembuatan situs web pemerintah daerah. *E-Government* intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien [10].

Pembangunan situs web bagi pemerintah daerah di Indonesia merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, yang isinya menggalakkan pemanfaatan teknologi informasi (internet) dalam menunjang aktivitas pemerintahannya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menuju terwujudnya *e-Government* di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id) pada bulan september 2009, dari 470 pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kotamadya maupun kabupaten terdapat 361 (77%) situs web pemerintah daerah, dan yang aktif atau bisa dibuka 316 situs web pemerintah daerah sisanya rusak, dalam pengembangan atau terkena sanksi (*suspended*).

Saat ini perkembangan dari situs web pemerintah daerah memang meningkat pesat, namun

baru dalam segi kuantitas sedangkan dari segi kesiapan situs web pemerintah daerah tersebut dalam menyongsong *e-Government* di Indonesia masih belum terlalu baik, tidak semua situs web pemerintah daerah menyediakan fasilitas pelayanan publik secara *online*. Selain itu sebagian besar pengelola situs web pemerintah daerah belum mengoptimalkan efektivitas untuk meningkatkan popularitas situs webnya, hal ini dapat dilihat dari minimnya popularitas link serta masih rendahnya peringkat *traffic* mayoritas situs web pemerintah daerah di Indonesia.

Semakin baik peringkat *traffic* dan popularitas *link* (jumlah eksternal *inlink* yang merujuk atau mereferensi menuju situs web pemerintah daerah), maka semakin populer suatu situs web pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi perpindahan informasi yang terjadi dari pemerintah daerah ke masyarakat. Karena sebagai apapun kualitas suatu situs web jika tidak memperhatikan segi efektivitas dalam meningkatkan popularitas, maka kualitas yang bagus tersebut akan menjadi kurang optimal.

Salah satu cara dalam mengukur popularitas situs web pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan perangkat yang dapat memperingkat popularitas situs web pemerintah daerah, dengan menggunakan parameter evaluasi Efektifitas (Popularitas *Link* dan Peringkat *Traffic*), Kecepatan (Waktu *Loading*), Isi Situs Web dan Kesiapan Menuju *e-Government* terhadap masing-masing pemerintah daerah. Dengan pemerinkatan popularitas situs web pemerintah daerah diharapkan akan memacu pengelola situs web pemerintah daerah untuk senantiasa meningkatkan kualitas informasi serta pelayanan terhadap masyarakat luas.

## 2. *e-Government*

Menurut World Bank, *e-Government* didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (*accountable*) serta transparan kepada masyarakat. Intinya *e-Government* adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien [4].

Terdapat dua hal utama dalam pengertian *e-Government*, pertama adalah penggunaan teknologi komunikasi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan kedua adalah tujuan pemanfaatannya sehingga jalannya pemerintahan dapat lebih efisien. Melalui teknologi informasi dalam hal ini internet, seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih

cepat sesuai dengan aturan jelas yang telah ditetapkan.

*E-Government* bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Pada konsep *e-Government*, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. *E-Government* hanya berfungsi pada konteks penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

Pada pelaksanaan *e-Government*, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan melalui internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, pelayanan dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat diperoleh di kantor, rumah bahkan lewat ponsel dimanapun tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan atau tempat-tempat pelayanan umum. Akselerasi kecepatan pelayanan berarti juga merupakan penghematan dalam waktu, energi maupun sumber daya.

Model *e-Government* yang diterapkan di negara-negara luar adalah menggunakan model empat tahapan perkembangan yang meliputi :

- Fase pertama, berupa penampilan situs web (*web presence*) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat.
- Fase kedua, fase interaksi yaitu isi informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam situs web pemerintah.
- Fase ketiga, tahap transaksi berupa penerapan aplikasi atau formulir untuk secara online mulai diterapkan.
- Fase Keempat, fase transformasi berupa pelayanan yang terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antar pemerintah, sektor nonpemerintah serta sektor swasta) [10].

Sesuai dengan yang tertera dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003, Wujud nyata dari aplikasi *e-Government* yang umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan *e-Government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan *e-*



Government di Indonesia yang memiliki sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.

Dari pengaplikasian tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan e-Government di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan yaitu:

- Tingkat 1 merupakan tingkat Persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
- Tingkat 2 merupakan tingkat Pematangan yang berupa Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- Tingkat 3, tingkat Pemantapan yang berisi Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
- Tingkat 4 adalah tingkat Pemanfaatan yang berisi Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C)[10].

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1. Metode Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya dalam mengevaluasi situs web *e-Government* maupun situs web pemerintah daerah, antara lain berdasarkan metode penelitian dengan menggunakan kuesioner atau pengolahan data dengan menggunakan analisis deksriptif yang lebih menitikberatkan pada evaluasi kualitas situs web, seperti yang digunakan Barnes, S. J. dan Vidgen, R. T. (2005) serta Fathul Wahid (2008). Kemudian ada juga yang menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan yang sama seperti layaknya mengevaluasi situs web *e-Banking*, situs web *e-Commerce* dan lain sebagainya seperti yang dilakukan Miranda, F. J. *et al* (2006), Vultur S. O. dan Marincas D. A. (2007) serta Yazan K. A. Migdadi (2008).

Memang masing-masing pendekatan atau metode evaluasi memiliki keunggulan masing-masing, namun sebagian besar menitikberatkan evaluasi pada segi kualitas situs web saja, masih sedikit yang mengevaluasi segi popularitas situs web, khususnya situs web pemerintah daerah. Dalam penelitian ini dipilih pendekatan pemberian bobot atau nilai terhadap subkategori-subkategori

parameter Efektivitas, Kecepatan, Isi Situs Web serta Kesiapan Menuju *e-Government* yang menitikberatkan evaluasi pada segi popularitas situs web pemerintah daerah.

#### 3.2. Metode Pembobotan yang Digunakan

Metode penilaian kualitas situs web seperti yang Miranda F. J. *et al* (2006) serta Yazan K. A. Migdadi (2008) gunakan dalam mengevaluasi kualitas situs web *e-Banking* di Spanyol, Yordania dan Inggris Raya dan Vultur S. O. dan Marincas D. A. (2007) gunakan dalam mengevaluasi kualitas situs web Fakultas Ekonomi Universitas di Rumania, yaitu menggunakan kategori parameter *Accessibility*, *Speed*, *Homepage Size*, *Navigability* dan *Content Quality*, diadopsi sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dengan melakukan pembobotan pada parameter evaluasi Efektifitas (Popularitas *Link* dan Peringkat *Traffic*), Kecepatan (Waktu *Loading*), Isi Situs Web dan Kesiapan Menuju *e-Government*.

Penentuan besar bobot masing-masing parameter berdasarkan pertimbangan penulis sendiri, dengan memberikan bobot yang lebih besar pada parameter Efektivitas 55%, karena penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi segi efektivitas yaitu mengukur tingkat popularitas situs web pemerintah daerah. Kemudian diberikan bobot masing-masing 15% pada parameter Kecepatan, Isi Situs Web dan Kesiapan Menuju *e-Government*, untuk mendapatkan total bobot evaluasi 100%.

#### 3.3. Pembobotan Parameter Evaluasi

Tabel 1. Bobot Parameter Evaluasi

PARAMETER	BOBOT
<b>Effectivity</b>	<b>55</b>
Link Popularity	35
Traffic Rank	20
<b>Speed</b>	<b>15</b>
Waktu Loading	15
<b>Website Content</b>	<b>15</b>
Berita Daerah Terbaru	2
Informasi Pariwisata	2
Informasi Profil Daerah	1
Informasi Potensi Daerah	2
Informasi Fasilitas Kota	2
Informasi Peluang Investasi	1
Informasi Program Kegiatan Daerah	1
E-mail atau Nomor Telepon Resmi Daerah	1
Fasilitas download dokumen	1

Produk hukum	1
Search Engine	1
<b>e-Government Readiness</b>	<b>15</b>
Ketersediaan Pelayanan Publik Online	3
Polling dan Survey online	2
Fasilitas Interaktif online dengan PEMDA	2
Fasilitas Pembayaran online (Online Payment)	3
Fasilitas Kotak Saran atau Buku Tamu	2
Transparansi Informasi Finansial PEMDA	3

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Pemilihan Situs Web Pemerintah Daerah

Jumlah pemerintah daerah yang memiliki situs web resmi pemerintah daerah pada bulan September 2009 Dari 470 Pemerintah Daerah yaitu 361 (77%) situs web pemerintah daerah, dan yang aktif atau bisa diakses meningkat dari 201 menjadi 316 situs web, sisanya rusak, dalam pengembangan atau terkena sanksi (*suspended*).

Tabel 2. Jumlah Situs Web Pemerintah

	Jumlah	Situs Web	%	Web yang Bisa Dibuka	Web yang Tidak Bisa Dibuka
Dept./Kem./Lembaga Tinggi	37	37	100%	37 (100%)	0 (0%)
Lembaga Pem. Non Departemen	32	28	88%	28 (100%)	0 (0%)
Pemprov./Pemkab./Pemkot.	470	361	77%	316 (88%)	45 (12%)

(sumber: [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id) diakses 10 September 2009)

Dilakukan pemilihan terhadap sepuluh situs web pemerintah daerah secara acak untuk menggambarkan proses pemeringkatan popularitas, karena berapapun jumlah situs web yang di evaluasi, proses pemeringkatannya akan tetap sama.

##### 4.2. Hasil Pemilihan Situs Web Pemerintah Daerah

Pemilihan situs web pemerintah daerah yang akan dianalisis dalam penelitian ini dilakukan secara acak dengan menggunakan fasilitas pengacakan angka dengan menggunakan fasilitas Random

Number Generator (pembangkit angka acak) pada situs web [random.org](http://random.org), untuk kemudian dicocokkan dengan nomor urut situs web pemerintah daerah yang diakses pada tanggal 18 September 2009.

Sepuluh angka acak yang diperoleh yaitu 297, 315, 183, 47, 115, 268, 229, 139, 70 dan 75 dicocokkan dengan nomor urut situs web pemerintah daerah aktif atau situs web yang dapat diakses, yang telah diperiksa sebelumnya. Sehingga diperoleh sepuluh situs web pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten untuk di evaluasi, yaitu:

- ☐ PEMKOT Tarakan ([www.tarankota.go.id](http://www.tarankota.go.id)),
- ☐ PEMKOT Yogyakarta ([www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)),
- ☐ PEMKAB Musi Rawas ([www.musi-rawas.go.id](http://www.musi-rawas.go.id)),
- ☐ PEMKOT Bengkulu ([www.bengkulukota.go.id](http://www.bengkulukota.go.id)),
- ☐ PEMKAB Karawang ([www.karawangkab.go.id](http://www.karawangkab.go.id)),
- ☐ PEMKAB Sukamara ([www.sukamarakab.go.id](http://www.sukamarakab.go.id)),
- ☐ PEMKAB Purwakarta ([www.puwakarta.go.id](http://www.puwakarta.go.id)),
- ☐ PEMKAB Lamandau ([www.lamandau.go.id](http://www.lamandau.go.id)),
- ☐ PEMKAB Cianjur ([www.cianjurkab.go.id](http://www.cianjurkab.go.id)) dan
- ☐ PEMKAB Demak ([www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id)).

##### 4.3. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan

Proses evaluasi kesepuluh situs web pemerintah daerah dilakukan dengan pengamatan secara langsung masing-masing situs web. Untuk kategori parameter Efektivitas (*effectivity*) dan Kecepatan (*speed*) dilakukan dengan menggunakan fasilitas layanan evaluasi situs web otomatis yaitu [submitexpress.com](http://submitexpress.com) dan [alexa.com](http://alexa.com). Sedangkan untuk kategori parameter Isi Situs Web (*website content*) dan Kesiapan Menuju E-Government (*e-Government readiness*) dilakukan dengan cara pemeriksaan kelengkapan setiap subkategori parameter evaluasi. Sedangkan data yang digunakan adalah data tiap-tiap situs web pemerintah daerah yang diambil pada tanggal 26 September 2009.

Tabel 3. Hasil Pemeringkatan

10	<a href="http://www.lamandau.go.id">www.lamandau.go.id</a>	Lamandau	6	11	5	4	26
9	<a href="http://www.sukamarakab.go.id">www.sukamarakab.go.id</a>	Sukamara	6	12	12	5	35
8	<a href="http://www.demakkab.go.id">www.demakkab.go.id</a>	Demak	6	15	13	2	36
7	<a href="http://www.musi-rawas.go.id">www.musi-rawas.go.id</a>	Musi Rawas	12	9	12	7	40



PERINGKAT	1	2	3	4	5	6
SITUS WEB RESMI	www.lodja kota.go.id	www.tarak ankota.go.id	www.cianj urkab.go.id	www.purw akarta.go.id	www.kara wanakab.go.id	www.beng kulukota.go.id
PEMERINTAH DAERAH	Yogyakarta	Tarakan	Cianjur	Purwakarta	Karawang	Bengkulu
Effectivity	41	43	22	16	20	12
Speed	14	12	12	15	9	8
Content	14	14	15	14	15	15
e-Gov Readiness	9	7	9	6	2	7
Total	78	76	55	54	46	42

Sesuai dengan peringkat pada tabel di atas hasil dari pemeringkatan terhadap popularitas situs web pemerintah daerah, maka situs web pemerintah kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama, disusul oleh situs web pemerintah kota Tarakan dan seterusnya hingga peringkat terakhir yaitu situs web pemerintah kabupaten Lamandau.

-Sebagian besar pengelola situs web pemerintah daerah masih belum mengoptimalkan efektivitas situs webnya hal ini dapat dilihat dari banyaknya situs web pemerintah daerah yang memiliki nilai popularitas *link* (total eksternal *link* pada situs lain menuju ke situs web yang kita miliki) yang masih minim serta nilai peringkat *traffic* yang masih terlalu besar, yang berarti jumlah kunjungan ke situs web pemerintah daerah masih belum terlalu banyak. Waktu *loading* yang dimiliki oleh sebagian besar situs web pemerintah daerah umumnya 1 hingga 5 detik. Ini menunjukkan bahwa hampir semua pemerintah daerah peduli akan pelayanan melalui media *online* sebab waktu *loading* yang terlalu lama akan menyebabkan pengguna situs enggan untuk menunggu sampai *loading* selesai.

Sebagian besar situs web pemerintah daerah sudah menampilkan informasi minimal (profil daerah, batas wilayah, potensi daerah, pariwisata dan lainnya) tetapi masih banyak situs web pemerintah daerah yang tidak menyajikan informasi peluang investasi dan informasi fasilitas kota (transportasi, akomodasi, rumah sakit dan lain sebagainya). Namun sebagian besar situs web pemerintah daerah sudah memiliki *search engine*, yang sangat membantu pengunjung situs web pemerintah daerah.

Hampir seluruh situs web pemerintah daerah di Indonesia tidak menyediakan pelayanan publik *online*, hanya tersedia prosedur pembuatannya yang masih dikerjakan secara manual, kecuali beberapa situs web pemerintah yang sudah menyediakan fasilitas *e-Procurement* (Pelelangan *Tender online*). Kemudian hampir semua situs web tidak memiliki fasilitas pembayaran layanan publik secara *online*, dan terakhir belum semua situs web pemerintah daerah mwnyajikan informasi finansial (anggaran daerah) sebagai wujud transparansi kepada masyarakat umum.

## 5. Kesimpulan

Penggunaan kategori parameter evaluasi Efektivitas (Popularitas *Link* dan Peringkat *Traffic*), Kecepatan (Waktu *Loading*), Isi Situs Web (*Website Content*) dan Kesiapan Menuju *e-Government* (*e-Government Readiness*) dalam penelitian ini sudah dapat diimplementasikan sebagai perangkat dalam mengevaluasi dan memeringkat popularitas situs web pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat pada hasil pemeringkatan popularitas terhadap sepuluh situs web pemerintah daerah pada penelitian ini, yang menunjukkan total nilai evaluasi masing-masing situs web pemerintah daerah yang beragam sehingga proses pemeringkatan yang berdasarkan pada total nilai evaluasi dapat dilakukan.

Parameter evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini sudah dapat digunakan sebagai salah satu perangkat proses pemeringkatan popularitas situs web pemerintah daerah di Indonesia, walaupun dalam pembobotan subkategori parameter evaluasi penelitian ini masih memerlukan justifikasi teoritis sehingga lebih dapat diterima keabsahannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai metode pengevaluasian popularitas situs web, khususnya situs web pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka

- [1] Anonim, 2006, *Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah*, Artikel Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, <http://blogs.depkominfo.go.id/artikel/2006/01/17/kondisi-situs-web-pemerintah-daerah>, diakses tanggal 10 September 2009.

- [2] Aquillo, I.F., 2009, *Ranking Web of World University Methodology*, <http://www.webometrics.info/methodology.html>, diakses tanggal 10 September 2009.
- [3] Barnes, Stuart J. dan Vidgen, Richard T., 2006, *Data Triangulation and Web Quality Metrics: A Case Study in e-Government, Information and Management Journal*, Vol. 43, No.6, p. 767-777.
- [4] Broto, Dewi Retno *et all*, 2008, *Evaluasi Web Site e-Government Instansi Pemerintah Daerah*, [http://repository.gunadarma.ac.id:8000/2008\\_KNSI\\_UjiWebeGov\\_IWS\\_385.pdf](http://repository.gunadarma.ac.id:8000/2008_KNSI_UjiWebeGov_IWS_385.pdf), diakses tanggal 10 September 2009,
- [5] Hasibuan, Zainal A., 2007, *Langkah-langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government untuk PEMDA*, *Jurnal Sistem Informasi Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia*, Vol. 3, NO. 1, hal 1-5. Depok.
- [6] Migdadi, Yazan K. A., 2008, "Quantitative Evaluation of The Internet Banking Service Encounter's Quality: Comparative Study between Jordan and The UK Retail Banks", *Journal of Internet Banking and Commerce*, Vol. 13, No.2, p.1-8.
- [7] Miranda, Francisco Javier *et all*, 2006, "Quantitative Evaluation of e-banking websites: an empirical study of Spanish Banks", *The Electronic Journal Information System Evaluation*, Vol. 9, No. 2, p. 73-82.
- [8] Misra, D.C., 2007, "Conceptual Foundations of E-government: From Networked Society to Networked E-Governments", Department of Administrative Reforms, Government of India. XXXIX(3)17-36, New Delhi, India.
- [9] Presiden Republik Indonesia, 2003, "Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government", Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003, [http://www.deptan.go.id/bdd/admin/i\\_presiden/Inpres-03-03.pdf](http://www.deptan.go.id/bdd/admin/i_presiden/Inpres-03-03.pdf), diakses 10 September 2009,
- [10] Sosiawan, Edwi Arif, 2008, "Evaluasi Implementasi e-Government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia : Perspektif Content dan Manajemen", <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/manajemen%20e gov.pdf>, diakses tanggal 15 september 2009.
- [11] Vultur, Sidonia Otilia and Marincas, Delia Adriana, 2007, "Web Site Projects Evaluation—A Case Study Of Romanian Faculties Of Economics Web Sites", *Journal of Applied Quantitative Methods*, Vol. 2, No.3, p. 289-301.
- [12] Wahid, Fathul, 2008, "Evaluating Focus and Quality of Indonesian e-Government Websites", *Proceedings of the National Seminar on Application of Information Technology*, Yogyakarta, p. 39-43.
- [13] -, <http://www.alexacom/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [14] -, <http://www.bengkulukota.go.id/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [15] -, <http://www.cianjurkab.go.id/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [16] -, <http://www.demakkab.go.id/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [17] -, <http://www.depkominfo.go.id/>, diakses tanggal 18 September 2009.
- [18] -, <http://www.jogjakota.go.id/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [19] -, <http://www.karawangkab.go.id/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [20] -, <http://www.lamandau.go.id/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [21] -, <http://www.musi-rawas.go.id/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [22] -, <http://www.purwakarta.go.id/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [23] -, <http://www.submitexpress.com/linkpop/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [24] -, <http://www.submitexpress.com/analyzer/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [25] -, <http://www.sukamarakab.go.id/>, diakses tanggal 26 September 2009.
- [26] -, <http://www.tarakankota.go.id/>, diakses tanggal 26 September 2009.